

BAB IV

UPAYA DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

4.1 Kebijakan Kesehatan Dalam Negeri Pada Masa COVID-19

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona, khususnya pada industri manufaktur dan pariwisata. Pemerintah terpaksa menerapkan berbagai himbauan untuk menjaga jarak sosial atau dikenal juga dengan *social distancing* hingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah mulai Kota Jakarta pada 10 April 2020. Hal ini di sebabkan jumlah orang yang tertular dengan virus corona terus meningkat setiap hari, memaksa pemerintah untuk bertindak cepat. Ada sedikit keraguan bahwa situasi ini mempengaruhi bagaimana ekonomi setiap lapisan masyarakat, ketahanan pangan di setiap daerah dan problem-problem lainnya. Keraguan tersebut muncul karena, ada gangguan ekonomi dunia. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan ekonomi (Purbantina and Hapsari, 2020).

Tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi pendapatan nasional semuanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pendapatan negara menurun 10% karena dampak negatif COVID-19. Penurunan penerimaan akibat wabah COVID-19 sebagian besar akan mempengaruhi penerimaan pajak. Dengan ekonomi yang buruk, dukungan untuk tunjangan pajak, dan tarif PPh yang lebih rendah berakibat pada penurunan penerimaan pajak negara, dampak tersebut tentunya memerlukan kebijakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Sistem keuangan terancam oleh pandemi COVID-19, terbukti dengan berkurangnya sejumlah kegiatan ekonomi domestik. COVID-19 memiliki pengaruh yang cukup signifikan dari sisi pengeluaran. Penyelesaian masalah terkait COVID-19 diharapkan tidak terlalu membebani defisit anggaran negara.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan perekonomian negara (Nugrahaningsih and Suwarso, 2021).

Di sisi lain kebijakan dari segi kesehatan juga harus terus diterapkan, pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi tujuan utama yang dilakukan. Pengawasan dan pemantauan yang ketat di lapangan diperlukan untuk secara tepat melacak dan mungkin mengantisipasi adaptasi, evolusi, penularan, dan patogenisitas dari virus COVID-19. Juga harus adanya pedoman pengendalian dan pencegahan penyakit, karena COVID-19 merupakan hal baru saat itu, ini sangat penting karena faktor tersebut akan mempengaruhi mortalitas dan prognosis (Margono, Irawan, Graciella, Ivana, *et al.*, 2021).

Kebijakan awal Indonesia adalah memberlakukan pembatasan perjalanan internasional mulai 27 Januari 2020. Sebanyak 238 WNI juga dievakuasi dari Wuhan secara bersamaan oleh Indonesia. Indonesia memberlakukan beberapa aturan dan prosedur untuk mengatasi pandemi COVID-19 setelah mengetahui kasus pertama yang terinfeksi dan menyadari betapa mengerikan situasinya. Salah satu kebijakan dan tindakan tersebut termasuk menunjuk 100 rumah sakit umum di seluruh Indonesia sebagai rumah sakit rujukan pada 3 Maret 2020. Untuk menghadapi peningkatan jumlah pasien COVID-19, Indonesia menambah jumlah rumah sakit rujukan menjadi 227 pada 8 Maret 2020. Namun, pandemi COVID-19 tetap menjadi masalah, dan meskipun dengan upaya ini jumlah korban terus meningkat dengan cepat (Hirawan and Verselita, 2020).

Pemerintah Indonesia juga memberlakukan kebijakan segregasi sosial bagi masyarakat dan menawarkan pedoman protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, menghindari area keramaian, menjaga jarak aman, mengonsumsi makanan seimbang, mengelola penyakit comorbid, memperhatikan populasi rentan, dan menjalani gaya hidup bersih dan sehat. Namun, dalam praktiknya, banyak orang yang mengabaikan instruksi keselamatan yang diberikan dalam menghadapi pandemi COVID-19 tersebut. Selain itu, Presiden RI juga telah membuat keputusan terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pedoman COVID-19 di Indonesia dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia pada akhir Maret 2020. Dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah untuk menurunkan dampak dan angka kematian, panduan ini ditujukan untuk tenaga medis serta masyarakat umum.

Protokol untuk tes cepat menggunakan RDT, tes laboratorium, manajemen pasien, dan alat penjangkauan/komunikasi semuanya tercakup dalam pedoman tersebut. Contohnya ada tiga derajat risiko dalam prosedur pemeriksaan cepat dan pemeriksaan laboratorium dalam pedoman tersebut antara lain; orang tanpa gejala, Orang Dalam Pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan. Hasil tes yang didapat dilanjutkan dengan isolasi orang yang diduga untuk mencegah penularan ke orang lain, kemudian dilanjutkan dengan rapid test dan terakhir dilakukan PCR jika diperlukan (Triwibowo and Martha, 2021b).

Pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) setelah dikhawatirkan kasus COVID-19 tak kunjung berkurang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease 19* (COVID-19). Dalam PSBB yang diterapkan di Indonesia terdapat beberapa hal yang dibatasi seperti, kegiatan di sekolah dan tempat kerja, kegiatan di ruang publik, kegiatan sosial budaya, dan pengoperasian transportasi umum dilarang selama PSBB (Triwibowo and Martha, 2021b).

Wabah COVID-19 tidak hanya mengganggu lingkungan sosial setempat, itu juga memicu ketakutan di antara para tenaga medis yang menjadi ujung tombak melawan COVID-19. kelompok pelayan kesehatan adalah kelompok yang paling berisiko terpapar COVID-19. Ditambah dengan infrastruktur dan fasilitas yang diperoleh tidak mendukung tenaga kesehatan, seperti di tempat-tempat penduduk tertinggal di daerah terpencil dengan sistem kesehatan yang masih terbatas dalam akses ke layanan kesehatan. Dokter, perawat, dan semua anggota staf lain di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang berisiko tertular virus juga berada di garda depan perang melawan COVID-19. Rumah sakit dalam hal ini harus melakukan upaya untuk mensosialisasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Pelayan kesehatan lebih menekankan penggunaan alat pelindung diri (APD) sebagai bagian dari strategi pencegahan kecelakaan dan pengendalian infeksi di tempat kerja mereka (Yunanda, 2020b).

Kapasitas sistem kesehatan di Indonesia tidak mencukupi untuk menahan wabah COVID-19. Fasilitas Layanan Kesehatan telah bekerja untuk memerangi COVID-19 dengan memperkuat sistem kesehatan untuk memastikan bahwa rumah sakit memiliki kemampuan perawatan pasien yang memadai, memanfaatkan jaringan dan perawatan

medis online, menggunakan sistem/platform telemedicine, dan menyiapkan dana darurat untuk bidang kesehatan. Sumber daya manusia dalam menangani kasus ini sama vitalnya dengan pelayanan kesehatan. Peran tenaga kesehatan dalam situasi ini adalah mengkoordinasikan lintas program di Puskesmas/Faskes dalam menentukan cara penanggulangan pandemi COVID-19, melakukan analisis data dan mengidentifikasi kelompok sasaran berisiko yang memerlukan tindak lanjut, mengkoordinir kader RT/RW/Kelurahan dan tokoh masyarakat setempat terkait sasaran kelompok berisiko dan memodifikasi pelayanan sesuai dengan kondisi wilayah, serta melakukan sosialisasi terpadu dengan organisasi masyarakat lainnya. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan dalam menghadapi pandemi secara langsung mempengaruhi pertumbuhan kompetensi SDM (Putri, 2022).

Untuk memerangi wabah ini, diperlukan APD seperti masker N95, celemek, sarung tangan, pelindung mata, sepatu bot, dan celemek. Dilaporkan banyak alat pelindung diri yang digunakan terkadang salah. Masih sangat sedikit rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menyediakan APD untuk tenaga medis. Selain APD, tidak banyak tenaga kesehatan yang membantu penanganan kasus pandemi COVID-19, seterusnya jumlah sumber daya manusia tidak cukup dan distribusinya tidak merata di Indonesia. Karena dalam hal ini banyak tenaga medis yang gugur akibat wabah pandemi COVID-19, maka diharapkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berdaya saing. Wabah COVID-19 di Indonesia dikendalikan tidak hanya dengan memiliki rumah sakit yang cukup dan sumber daya manusia yang baik, tetapi juga dengan mempertimbangkan semua aspek sistem kesehatan, termasuk tenaga kerja, sistem informasi, akses obat-obatan, pembiayaan, tenaga kerja, dan tata kelola industri kesehatan (Putri, 2022). Diplomasi Indonesia digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada seperti diplomasi alat pelindung diri dan pelatihan terhadap tenaga medis. Selain diplomasi vaksin, kerjasama bilateral Indonesia dengan Korea selatan juga membahas tentang alat pelindung diri dan pelatihan tenaga medis untuk mencegah peningkatan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan mengingat rentannya kelompok tersebut (Setiawan, Affianty and Tanjung, 2021).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama selama pandemi COVID-19, terdapat sejumlah kebijakan kesehatan dalam negeri yang diambil untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, melaksanakan program kesehatan masyarakat, dan meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia (Amrullah *et al.*, 2020). Berikut adalah beberapa contoh kebijakan yang telah diambil, antara lain :

1. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan alokasi dana COVID-19

Pemerintahan Joko Widodo telah berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini memberikan akses ke layanan kesehatan dasar dan lanjutan dengan premi yang terjangkau. Dalam hal penanganan COVID-19 semua ditanggung oleh pemerintah.

2. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Darurat

Selama pandemi COVID-19, pemerintah meningkatkan jumlah dan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan darurat di berbagai daerah untuk menghadapi lonjakan kasus dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang tepat.

3. Program Vaksinasi Massal

Pemerintah melaksanakan program vaksinasi massal untuk mempercepat imunisasi masyarakat terhadap COVID-19. Vaksinasi ini diselenggarakan secara gratis dan berdasarkan prioritas kelompok sasaran, seperti tenaga kesehatan, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

4. Kampanye Kesehatan Masyarakat

Pemerintah juga gencar mengadakan kampanye kesehatan masyarakat yang berfokus pada edukasi tentang COVID-19, cara-cara penularan virus, pentingnya menjaga kebersihan diri, dan penggunaan masker. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan.

5. Peningkatan *Testing* dan *Contact Tracing*

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan kontak sangat penting untuk mendeteksi kasus COVID-19 lebih cepat dan menghentikan penyebaran virus. Pemerintah berusaha meningkatkan jumlah tes dan pengawasan terhadap kontak erat pasien positif.

6. Dana dan Bantuan Kesehatan

Pemerintah menyediakan dana dan bantuan kesehatan untuk membantu rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis dalam menangani pandemi. Bantuan tersebut mencakup peralatan medis, perlengkapan pelindung diri (APD), dan dukungan finansial untuk perawatan pasien COVID-19.

7. Kebijakan Pembatasan Sosial dan Pemberlakuan Protokol Kesehatan

Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan untuk membatasi penyebaran virus. Hal ini termasuk pembatasan mobilitas, penutupan sejumlah tempat publik, dan pembatasan kapasitas di tempat-tempat umum.

8. Pendanaan Kesehatan

Pemerintah meningkatkan alokasi dana untuk sektor kesehatan guna mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Hal ini mencakup peningkatan anggaran untuk pembiayaan berbagai program kesehatan dan mendukung perawatan pasien.

Kebijakan-kebijakan di atas adalah langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, melaksanakan program kesehatan masyarakat, dan meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Tentu saja, kebijakan-kebijakan ini merupakan upaya terus-menerus yang terus berkembang seiring dengan dinamika pandemi dan kebutuhan kesehatan masyarakat (Amrullah *et al.*, 2020).

4.2 Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan Korea Selatan di Masa COVID-19

Selama pandemi COVID-19, hubungan diplomasi internasional mengalami transformasi yang signifikan. Masalah kesehatan yang sebelumnya terbatas pada satu atau dua kawasan saja, sejak pandemi berdampak signifikan pada pola kawasan internasional. Pandemi COVID-19, yang merambat di hampir semua negara pada tahun 2020 dan berlangsung hingga tahun 2021, telah ditingkatkan statusnya menjadi darurat kesehatan global sebagai akibat dari situasi stres di kancah internasional. Mayoritas efek pandemi ini adalah pada kesehatan populasi suatu negara. Pandemi COVID-19 mengakibatkan kematian yang signifikan di beberapa negara. Akibatnya, hampir semua pemerintah

bergerak aktif menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan. Bu Retno Marsudi, menteri luar negeri Indonesia, menguraikan tiga inisiatif pemfokusan ulang untuk prioritas layanan diplomatik negara. Prioritas utama adalah melindungi warga negara Indonesia, prioritas kedua adalah membantu pemerintah dalam mengelola dampak kesehatan dan sosial ekonomi pandemi. Prioritas ketiga adalah mendukung perdamaian dan stabilitas global. Terkait kontribusinya terhadap stabilitas global, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia juga turut mensponsori resolusi Sidang Umum PBB pertama tentang COVID-19 bertajuk "Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019" bersama lima negara lainnya (Mukrimaa *et al.*, 2016).

Selain itu, organisasi *World Health Organization* (WHO) berperan besar dalam diplomasi kesehatan internasional di Indonesia. Indonesia telah bergabung dengan Dewan Eksekutif WHO untuk tahun 2017-2021, demikian menurut Kamapradipta Isnomo, direktur urusan sosial budaya dan organisasi internasional untuk negara berkembang kementerian luar negeri. Indonesia mendukung regulasi virus dan akses vaksin di WHO untuk memastikan vaksinasi dapat digunakan oleh siapa saja untuk membantu meningkatkan kesehatan global. Selain itu, diplomasi kesehatan dilakukan melalui Kementerian Kesehatan. Menurut Oscar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Indonesia telah menandatangani 22 *Memorandum of Understanding* (MOU) kerjasama kesehatan dengan negara sahabat pada 2021, dari 3 MOU pada tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman MOU tersebut dibuatlah, *Joint Action Plan* (JAP), *Plan of Action* (POA), dan pelaksanaan *Joint Working Group* (JWG) serta berbagai kegiatan implementasi untuk menekan COVID-19. Dalam rangka memerangi pandemi yang melanda bangsa dan mengakibatkan kematian serta melemahnya kinerja ekonomi, Indonesia melakukan diplomasi kesehatan global untuk mendapatkan bantuan dan berpartisipasi dalam forum internasional untuk menyelesaikan masalah kesehatan global tersebut (Setiawan, Affianty and Tanjung, 2022b).

Berbagai kajian telah dilakukan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan diplomasi kesehatan internasional, khususnya terkait dengan wabah COVID-19. Berdasarkan, I Gede Wahyu Wicaksana (2020) menelaah persoalan Indonesia dengan diplomasi kesehatan era pandemi pemerintahan Joko Widodo-Maruf

Amin. Terlepas dari kenyataan bahwa agenda kesehatan masyarakat telah diakui sebagai komponen penting dalam hubungan internasional, Wicaksana menemukan bahwa implementasi Indonesia kebijakan luar negerinya terkait pandemi COVID-19 masih belum signifikan. Kinerja Kementerian Luar Negeri terhambat oleh persoalan dalam negeri, khususnya marjinalisasi diplomasi dalam pengelolaan krisis nasional. bersama dengan kelemahan struktural dan praktis dari sistem diplomasi Indonesia (Putri, 2020).

Terdapat juga penelitian terdahulu oleh, Albert Triwibowo (2020) memaparkan peran khusus diplomasi dalam pandemi COVID-19, termasuk untuk Indonesia. Menurut laporan, Indonesia tidak dapat melakukan tes cepat karena ukuran dan populasinya yang besar. Indonesia bekerja sama dengan China dan Korea Selatan untuk mengatasi hal tersebut. Indonesia juga aktif mempromosikan resolusi di Majelis Umum PBB. Kepemimpinan di ASEAN dilaporkan kurang terlibat dalam urusan COVID-19 dibandingkan di PBB. Pada KTT Penyakit Virus Corona ASEAN 2019, ASEAN mengeluarkan Deklarasi tetapi kesulitan mengumpulkan uang untuk memerangi COVID-19 (Silalahi and Ginting, 2020).

Selanjutnya, penelitian Jessica Martha (2020) menggarisbawahi perlunya Indonesia menggunakan strategi diplomasi publik yang serupa dengan yang digunakan oleh Korea Selatan, Taiwan dan Georgia. Mempromosikan cita-cita yang dapat memperkuat stabilitas negara, menumbuhkan rasa saling mengerti, menyelesaikan miskomunikasi, dan meningkatkan reputasi adalah keunggulan diplomasi publik. Memahami peristiwa, memperkuat jaringan, dan membuat kesepakatan dan perjanjian dengan negara lain adalah semua cara diplomasi publik yang dapat membantu upaya untuk menyelesaikan situasi yang disebabkan oleh COVID-19 (Hidayat, Anam and Munir, 2022b).

Keempat, penelitian Natalie Sambi (2020) menyebutkan bagaimana Indonesia memanfaatkan posisinya di Asia untuk mendorong kerjasama multilateral di bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan dalam kajian tentang tujuan Indonesia di Indo-Pasifik. Salah satu ilustrasinya adalah bagaimana organisasi di Indonesia dan IORA berkonsentrasi pada penelitian vaksinasi serta aksesibilitas pasokan medis dan langkah-langkah keamanan. Sambil mengamati dalam analisisnya bahwa meskipun kesulitan

ekonomi Indonesia akibat COVID-19 dan anggarannya yang ketat, strateginya terhadap Indo-Pasifik tidak akan berubah. Dalam beberapa penelitian sebelumnya diatas, menjelaskan bagaimana Indonesia berpartisipasi dan menggunakan alat kebijakan luar negeri, seperti diplomasi, untuk memajukan kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional yang tidak stabil saat wabah virus corona. Namun, tidak mungkin memisahkan kebijakan luar negeri Indonesia di bidang medis dari fakta bahwa Indonesia bergantung pada teknologi kesehatan negara lain, terutama dalam kampanye dan pengadaan imunisasi. Dalam penelitian tersebut juga, konsep diplomasi global, kondisi kesehatan global, dan bagaimana kesehatan global dikendalikan melalui diplomasi dipetakan terlebih dahulu sebelum mengkaji bagaimana diplomasi kesehatan global selama pandemi ini (Jatmika *et al.*, 2022).

Pada masa pandemi COVID-19, banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Korea Selatan, terlibat dalam berbagai upaya diplomasi kesehatan untuk mengatasi krisis kesehatan global ini. Diplomasi kesehatan mencakup berbagai langkah kolaboratif dan koordinatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara serta berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam penanganan pandemi (Hidayat, Anam and Munir, 2022b). Berikut beberapa aspek diplomasi kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan selama masa COVID-19:

1. **Pertukaran Informasi dan Pengalaman:** Kedua negara dapat berbagi informasi mengenai kebijakan kesehatan, strategi pengujian dan pelacakan, pengobatan, dan langkah-langkah mitigasi yang telah diambil. Ini membantu masing-masing negara memperoleh wawasan baru dan memperbaiki respons mereka terhadap pandemi.
2. **Bantuan Kemanusiaan:** Dalam upaya solidaritas global, Korea Selatan dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia, seperti penyediaan alat medis, peralatan pelindung diri (APD), obat-obatan, dan peralatan medis lainnya yang diperlukan untuk penanganan COVID-19.
3. **Kolaborasi Penelitian:** Kedua negara dapat bekerja sama dalam penelitian ilmiah untuk mengembangkan pengobatan, vaksin, atau terapi baru untuk COVID-19. Hal ini dapat melibatkan pertukaran ilmuwan, data, dan sumber daya penelitian.

4. Pelatihan Tenaga Kesehatan: Korea Selatan memiliki pengalaman yang baik dalam menangani pandemi MERS pada tahun 2015. Negara ini dapat membantu melatih tenaga kesehatan Indonesia dalam pengelolaan pasien, pencegahan infeksi, dan praktik-praktik terbaik lainnya.
5. Kerjasama Internasional: Melalui organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau badan regional, Indonesia dan Korea Selatan dapat bersama-sama mempromosikan kerjasama global dalam penanganan pandemi, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat internasional.
6. Pertukaran Keahlian Teknologi: Korea Selatan memiliki kemampuan teknologi yang kuat. Kedua negara dapat berkolaborasi dalam mengembangkan solusi teknologi seperti aplikasi pelacakan kontak atau platform telemedicine untuk membantu mengatasi pandemi.
7. Kemitraan Bisnis: Selain aspek kesehatan langsung, negara-negara ini juga dapat menjalin kemitraan dalam produksi dan distribusi alat kesehatan yang diperlukan selama pandemi, seperti alat tes COVID-19 atau peralatan medis lainnya.
8. Diplomasi Vaksin: Upaya bersama dapat dilakukan untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap vaksin COVID-19 bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, termasuk mendukung program vaksinasi massal.
9. Forum Diplomasi Kesehatan: Pihak-pihak berwenang dari kedua negara dapat mengadakan pertemuan dan forum khusus tentang diplomasi kesehatan, di mana isu-isu terkait COVID-19 dibahas dan langkah-langkah konkret untuk bekerjasama dapat dirumuskan.

Dalam situasi pandemi seperti ini, kerjasama dan solidaritas internasional sangat penting. Upaya diplomasi kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan dapat membantu masing-masing negara mengatasi tantangan yang dihadapi akibat COVID-19 serta membangun kerangka kerja kerjasama yang kuat untuk menghadapi ancaman kesehatan global di masa depan. Duta Besar Korea Selatan untuk Republik Indonesia secara simbolis telah menyerahkan muatan bantuan pertama dari Pemerintah Korea Selatan untuk pengobatan Covid-19 di Indonesia sebagai bagian dari inisiatif negara tersebut untuk "Memperkuat Kerja Sama Bilateral dengan Korea Selatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19." 300 alat penyemprot disinfektan merupakan paket dukungan. Untuk

membantu pemerintah Indonesia memerangi wabah ini, yang telah mempengaruhi seluruh dunia, pemerintah Korea Selatan telah berjanji untuk memberikan dukungan dalam bentuk barang sebesar USD \$500,000. Selain itu, BNPB juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam memerangi pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia juga menciptakan peluang baru untuk memperluas kolaborasi, termasuk memperluas pembelian peralatan medis yang sangat dibutuhkan kedua negara, seperti APD dan ventilator (Triwibowo and Martha, 2021b).

Dengan bantuan pemerintah Korea Selatan dan sektor komersial, Indonesia dan Korea Selatan memerangi COVID-19 di Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara secara umum positif, terutama di sektor komersial, ekspor-impor, serta perjalanan dan pariwisata. Pada Januari 2020, perdagangan kedua negara Asia bernilai US\$1.311 juta. Indonesia menyediakan listrik dan bahan mentah untuk bisnis Korea Selatan. Bagi banyak perusahaan di Korea Selatan, salah satu tujuan investasi utama adalah Indonesia. Investor terbesar kesembilan di Indonesia pada tahun 2019 adalah Negeri Ginseng. Pada tahun itu, Korea Selatan menghasilkan total US\$1,1 miliar (2.952 proyek) di Indonesia, turun 33% dari investasi tahun sebelumnya sebesar US\$1,6 miliar (2.412 proyek) (Setiawan, Affianty and Tanjung, 2021).

Dalam istilah “perang” melawan pandemi COVID-19, tentunya keadaan ini justru mempertemukan negara-negara di dunia yang mengalami tragedi yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan kolaborasi yang lebih baik lagi untuk menghentikan penyebaran virus dan mengurangi dampak negatifnya di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Hasil besar dari diplomasi yang dilakukan ialah kurva korban COVID-19 berhasil ditekan oleh Korea Selatan dan Indonesia. Jumlah insidensi yang terjadi jauh lebih sedikit, dengan jumlah pasien sembuh terus meningkat. Oleh karena itu, Korea Selatan dan Indonesia dapat menjadi model dalam menangani pandemi ini secara efektif dan terus mengembangkan diri serta melakukan diplomasi untuk percepatan implementasi. Kemampuan pemerintah Korea Selatan untuk melakukan tes cepat dalam skala besar merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan karena memungkinkan pemerintah memantau dan merespons penyebaran virus corona dengan cepat. Pengujian besar-besaran tersebut juga dibantu oleh keberhasilan produksi massal alat tes virus corona oleh dua perusahaan

bioteknologi Korea Selatan, Kogene Biotech dan Seegene. Kedua perusahaan tersebut berharap dapat bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia untuk bersama-sama membuat alat tes. Meningat bahwa Alat Pelindung Diri (APD) juga akan diproduksi secara bersamaan; bahan bakunya akan berasal dari Korea Selatan dan pakaiannya akan dijahit di Indonesia. Selain alat tes COVID-19 dan alat penyemprot bertenaga baterai yang dapat diisi ulang, bantuan juga diberikan kepada Indonesia. Total ada 300 alat penyemprot yang dikirim ke Indonesia. Secara teknis, negara semakin siap bekerja sama memerangi pandemi dengan APD dan alat tes yang telah disediakan. *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) merupakan organisasi yang dipilih Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk menangani teknis pelaksanaan penyaluran bantuan. LG Group akan menyediakan 50.000 alat diagnostik COVID-19 (tipe RTPCR) sebagai bagian dari sektor swasta Korea Selatan, dan Hyundai Motor juga telah menyumbangkan 40.000 APD ke Indonesia. Bersama dengan AS dan UEA, pemerintah Korea Selatan telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu tujuan ekspor utama peralatan medis dan karantina (Purbantina and Hapsari, 2020).

Pemerintah di setiap negara terpaksa mengambil tindakan untuk melindungi keuangan internasional melalui program pertukaran mata uang sebagai akibat dari kondisi pandemi saat ini. Perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) yang ditandatangani pada 5 Maret 2020 mendapat apresiasi baik dari Indonesia maupun Korea Selatan. Platformnya sebesar KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun dan berlaku mulai 6 Maret 2020 hingga 5 Maret 2023 dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan. Rencana keuangan lainnya, yang dikenal sebagai Penyelesaian Mata Uang Lokal dengan *Local Currency Settlement with Appointed Cross Currency Dealer* (LCS ACCD), juga sedang dipromosikan oleh Indonesia. Ketika transaksi perdagangan antara dua negara diselesaikan dalam mata uang mereka sendiri dan dalam sistem hukum masing-masing, hal ini disebut sebagai penyelesaian perdagangan bilateral. Untuk membantu pelaksanaan LCS dengan membuka rekening dalam mata uang negara mitra di negaranya sendiri, skema ini memerlukan penunjukan Dealer Lintas Mata Uang yang Ditunjuk, atau bank. Tujuan dari LCS ACCD adalah untuk lebih meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian perdagangan, sehingga mengurangi tekanan terhadap Dolar AS terhadap mata uang lokal (Margono, Irawan, Graciella, Ivana, *et al.*, 2021).

Bersama Korea Selatan, Indonesia sedang melakukan diplomasi kesehatan. Diplomasi kesehatan yang dilakukan tentu ada satu faktor yang perlu diperhatikan ialah karena Korea Selatan merupakan negara yang memiliki reputasi dalam menangani kasus COVID-19 dengan baik. Berdasarkan data pada 3 Januari hingga 30 Maret 2020, sebanyak 395.194 orang telah menjalani tes darah, dan 13.531 lainnya sedang dalam proses. Hasil tes negatif 372.002 orang, konfirmasi 9.661 orang, aktif 4.275 orang, sembuh 5.228 orang, dan meninggal 158 orang. Korea Selatan belajar dari Wabah *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) bahwa hal utama yang perlu dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 adalah pembatasan sosial, meskipun isolasi sosial bukanlah lockdown, respons cepat terhadap wabah, rapid massal, pengujian, pelacakan kontak, dan transparansi dalam penyebaran informasi tentang COVID-19 (Silalahi and Ginting, 2020).

Salah satu cara pemerintah bekerjasama dengan negara asing, LSM internasional, LSM, dan sektor swasta lainnya untuk mengatasi masalah kesehatan adalah melalui diplomasi kesehatan. Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), diplomasi kesehatan global sangat penting untuk memastikan keselamatan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai keamanan, dan membantu negara-negara berpenghasilan rendah, menurut Kickbusch (2013). Diplomasi kesehatan penting karena mempertimbangkan faktor-faktor selain kesehatan, seperti dampak politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hubungan antara pemerintah, aktor non-negara, dan parlemen ketika mempertimbangkan beragam kebijakan kesehatan nasional. Karena banyaknya permasalahan kesehatan di abad ke-21 yang memerlukan solusi politik dan teknologi, diplomasi kesehatan ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa permasalahan kesehatan memiliki dimensi global yang melampaui batas-batas untuk meningkatkan hubungan dengan negara tetangga dengan diplomasi kesehatan (Purbantina and Hapsari, 2020).

Secara keseluruhan tujuan diplomasi kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam masa pandemi COVID-19 adalah untuk saling mendukung, bertukar informasi dan sumber daya, serta membangun kerangka kerja sama yang bermanfaat bagi penanganan pandemi ini dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Nugrahaningsih

and Suwarso, 2021). Tetapi secara spesifik Indonesia melakukan diplomasi kesehatan dengan Korea Selatan dalam konteks pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut :

1. Penukaran Informasi dan Pengalaman

Salah satu tujuan utama diplomasi kesehatan adalah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani pandemi. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman Korea Selatan dalam menghadapi pandemi MERS dan penanganan awal COVID-19 untuk menginformasikan kebijakan dan strategi di tingkat nasional.

2. Memperkuat Kapasitas Kesehatan

Melalui diplomasi kesehatan, Indonesia dapat memperoleh bantuan teknis dan pelatihan dari Korea Selatan dalam hal penanganan pasien COVID-19, pengujian dan pelacakan kontak, manajemen fasilitas kesehatan, serta perawatan medis yang efektif.

3. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan

Indonesia dapat bekerja sama dengan Korea Selatan dalam penelitian dan pengembangan solusi baru untuk COVID-19, seperti vaksin, terapi, atau pengobatan yang lebih baik. Kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan solusi medis yang diperlukan untuk mengatasi pandemi.

4. Mendapatkan Bantuan Peralatan Medis

Melalui diplomasi kesehatan, Indonesia dapat meminta bantuan dari Korea Selatan dalam penyediaan alat medis, peralatan pelindung diri (APD), obat-obatan, dan peralatan medis lainnya yang diperlukan untuk menangani kasus COVID-19.

5. Mendorong Solidaritas dan Kerjasama Global

Dalam situasi pandemi global, penting untuk memperkuat kerjasama antar negara. Melalui diplomasi kesehatan dengan Korea Selatan, Indonesia juga dapat mendorong solidaritas dan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan kesehatan yang dihadapi oleh seluruh dunia.

6. Mengamankan Akses terhadap Vaksin dan Obat-obatan

Indonesia dapat menggunakan diplomasi kesehatan untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap vaksin dan obat-obatan COVID-19, terutama ketika negara-negara bersaing untuk mendapatkan pasokan yang terbatas.

7. Membangun Hubungan Bilateral yang Kuat

Melalui diplomasi kesehatan, Indonesia dapat memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Kolaborasi dalam krisis kesehatan dapat menjadi dasar bagi kerjasama yang lebih luas di berbagai bidang di masa depan.

8. Mendukung Kemitraan Multilateral

Baik Indonesia maupun Korea Selatan adalah anggota berbagai organisasi internasional seperti WHO. Melalui diplomasi kesehatan, keduanya dapat bekerja sama dalam kerangka organisasi internasional untuk mempromosikan koordinasi global dalam menangani pandemi.